

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Maka berdasarkan hasil analisis dan hasil wawancara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

Proses	Maturity Level	Kesimpulan
<b>1.PO 3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PO 3.1</li></ul>	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum terdapat analisis terhadap teknologi yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menentukan arah teknologi.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PO 3.2</li></ul>	3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat infrastruktur teknologi informasi yang konsisten dan di sertai dengan fleksibilitas dari infrastruktur teknologi untuk merespon kebutuhan informasi.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PO 3.3</li></ul>	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terdapat proses yang bertujuan untuk memantau berbagai sektor guna mendukung perkembangan terhadap infrastruktur, Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi informasi di adakan sesuai dengan kebutuhan PT.PLN sendiri tanpa melalui proses pemantauan terhadap tren yang sedang berkembang.</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 3.4</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.PLN menggunakan standar ISO 9001:2008 yang menjadi standar yang mendukung penyediaan teknologi guna meningkatkan kinerja sumber daya manusia</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 3.5</b></li> </ul>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat Dewan arsitektur teknologi guna memberikan pedoman arsitektur dan saran aplikasi.</li> </ul>
<p><b>2. PO 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.1</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kerangka kerja IT yang di buat guna mendukung strategi TI. Akan tetapi kerangka kerja yang ada bersifat tidak konsisten dalam pelaksanaannya.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.2</b></li> </ul>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat komite strategi teknologi informasi di tingkat dewan untuk memastikan bahwa tata kelola teknologi informasi sebagai bagian dari pemerintahan perusahaan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.3</b></li> </ul>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat komite pengarah teknologi informasi (atau setara) pada PT.PLN.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.4</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah di temukannya keselarasan antara fungsi TI di dalam organisasi, Sehingga Menejemen dari TI telah berhasil mendukung tujuan bisnis.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.5</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat Dukungan yang efektif dan efisien hal ini di buktikan dengan penempatan karyawan sesuai latar belakang pendidikan dan setiap karyawan baru harus melalui pelatihan dasar sehingga karyawan di tuntut untuk menghasilkan strategi yang di anggap paling tepat guna mendukung tujuan strategi bisnis.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.6</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.PLN telah memiliki Keputusan General Manager mengenai Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Area Dan Rayon, yang berisikan tugas pokok serta berbagai fungsi utama dari setiap divisi yang harus di penuhi oleh setiap anggota divisi tersebut.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.7</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penanggung jawab IT untuk area bandung menjadi tugas Kantor distribusi bandung yang beralamat di Jalan asia afrika No.63 Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40111. KD melakukan audit berkala mengenai infrastruktur untuk membuat perencanaan</li> </ul>

		optimalisasi yang tertuang pada action plan, setelah selesai KD membuat laporan hasil optimalisasi yang tertuang di Laporan Optimalisasi.
• <b>PO 4.8</b>	3	• Terdapat pembagian tanggung jawab untuk resiko juga pembagian peran yang jelas, semua terangkum dalam SOP.
• <b>PO 4.9</b>	2	• Terdapat aturan berupa SOP, untuk mengatur kepemilikan data.
• <b>PO 4.10</b>	2	• Terdapat pengawasan yang jelas terhadap fungsi teknologi informasi. Pengawasan akan dilakukan oleh Asisten Menejer Perencanaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di area, AsMan Perencanaan berkoordinasi dengan Deputi Menejer yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di regional.
• <b>PO 4.11</b>	3	• Terdapat pembagian peran yang formal . Pembagian peran dan tanggung jawab telah di atur sesuai dengan Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Area Dan Rayon
• <b>PO 4.13</b>	2	• Telah terdapat kontrol yang jelas terhadap masalah ketergantungan pada suatu individu terhadap pekerjaan yang kritis

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.14</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat kerja sama yang berlangsung dalam jangka panjang yang di sertai kepatuhan terhadap kontrak. Dalam hal ini PT.PLN bekerja sama dengan yaitu PT. Indonesia Comnet Plus (ICON+).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.15</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terjalinnya hubungan yang jelas antara teknologi informasi sebagai penghubung dan berbagai fungsi lainnya, sebagai contoh dalam hal ini pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan.</li> </ul>
<b>3. PO 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.1</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat SOP yang bertujuan untuk pengelolaan dan penggunaan personal komputer akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pengkomunikasian SOP sendiri.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.2</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat SOP sebagai kontrol guna mencegah resiko-resiko yang muncul.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.3</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengembangan dan pemeliharaan akan kebijakan TI (SOP) akan tetapi pengembangan akan kebijakan TI tersebut di lakukan setelah terjadi masalah-masalah.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.4</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kebijakan TI sebagai pedoman untuk setiap masing-masing anggota karyawan. Akan tetapi penegakan atas disiplin pelaksanaan kebijakan TI sangatlah kurang.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.5</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat pengkomunikasian akan pemahaman bisnis dan tujuan teknologi informasi hanya untuk pengguna sistem. Pengarahan kepada pengguna sistem di lakukan jika ada pengenalan akan suatu teknologi baru, untuk pengarahan akan teknologi informasi di lakukan secara tidak konsisten</li> </ul>
<p><b>4. PO 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.1</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.PLN memiliki divisi HRD yang bertugas untuk melakukan perekrutan, kegiatan pelatihan, mengatur perpindahan jabatan karyawan dan prosedur pemberhentian karyawan. Untuk proses perekrutan PT.PLN telah memiliki prosedur yang tetap dan telah cocok dengan kebutuhan perusahaan, karyawan baru pun di berikan pelatihan guna mendukung kinerja karyawan tersebut dalam</li> </ul>

		melaksanakan kewajibannya.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.2</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.PLN tidak memiliki persyaratan khusus terhadap calon karyawan baru yang hendak bergabung. Dalam pemenuhan kemampuan karyawan baru agar sesuai dengan peran yang akan di tempati kelak.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.3</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah di lakukan penerapan terhadap tingkat pengawasan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab dan, adanya kompensasi yang sesuai dengan syarat yang telah ada. Semua tertulis jelas dalam SOP.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.4</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat dua pelatihan, yang pertama pelatihan dasar, pelatihan dasar di jalani oleh calon karyawan mencakup pelatihan mengenai lingkup pekerjaan serta aturan-aturan yang harus di patuhi (SOP), kedua pelatihan lanjutan yaitu pelatihan yang bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan karyawan terhadap pengimplementasian teknologi baru. Sehingga pada dasarnya kedua pelatihan tersebut berguna untuk menunjang peran masing–masing individu.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.5</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.PLN sudah memberlakukan pelatihan dasar yang di sertai dengan pelatihan lanjutan, sehingga ketergantungan terhadap individu-individu kunci dapat di hindari.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.6</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses perekrutan dalam PT.PLN sudah mutlak adanya, dengan kata lain telah sesuai dengan kebutuhan PT.PLN aha tetapi PT.PLN tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan di masa datang.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.7</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pemeriksaan atau evaluasi terhadap sumber daya manusia pemeriksaan di lakukan secara mendadak dan tidak konsisten, yaitu ketika perusahaan membutuhkan kemampuan guna mendukung keberlangsungan suatu proyek.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.8</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat prosedur informal mengenai pergantian dan transfer <i>knowledge</i> yang telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. sebelum terjadinya perpindahan jabatan. seorang karyawan harus memberikan dasar-dasar pelatihan kepada penggantinya. Berbeda jika karyawan tersebut mengundurkan</li> </ul>



		diri atau terjadi pemecatan, calon penggantinya harus melalui pelatihan dasar yang di berikan perusahaan melalui pihak ke tiga.
<b>5. PO 8</b> • <b>PO 8.1</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT.PLN telah memiliki tindakan membangun yang di sertai maintenance pada setiap sistem, maintenance ini di lakukan oleh pihak ketiga, hal ini juga di dukung dengan adanya ISO 9001:2008 mengenai standarisasi sistem menejemen mutu.</li> </ul>
• <b>PO 8.2</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terdapat penerapan terhadap standar, prosedur dan praktek sebagai proses TI untuk mencapai tujuan sistem menejemen mutu.</li> </ul>
• <b>PO 8.3</b>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT.PLN sudah melakukan pengembangan dan mempertahankan standar untuk development dan akusisi, kegiatan pengembangan dan pertahanan terhadap standar di lakukan oleh perusahaan audit yang secara khusus di tunjuk oleh pihak PT.PLN sendiri, akan tetapi penerapan ini belum merata untuk semua development akusisi.</li> </ul>
• <b>PO 8.4</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT.PLN belum menggunakan dan melakukan penerapan menejemen kualitas pada setiap pelanggan PT.PLN.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• PO 8.5</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terdapat kegiatan perbaikan berkesinambungan terhadap perencanaan kualitas akan tetapi kegiatan perencanaan masih bersifat mendadak sesuai dengan kebutuhan PT.PLN, di karenakan belum terdapat program jangka panjang atau menengah yang jelas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PO 8.6</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi yang sesuai dengan manajemen mutu belum secara merata ada dan di implementasikan pada tiap departmen.</li> </ul>

#### 4.2 Saran

Berikut beberapa saran dari penulis berdasarkan *Control Objective* yang di gunakan,yaitu :

Proses	Maturity Level	Saran
<b>1.PO 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PO 3.1</li> </ul>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu di adakannya analisis terhadap teknologi serta pendokumentasiannya. mengingat pentingnya perencanaan terhadap arah teknologi kedepannya, guna mendukung perkembangan perusahaan.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 3.2</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan perlu lebih mengkaji kembali perencanaan terhadap infrastruktur agar tidak hanya terpaku pada kepentingan perusahaan saja, tetapi perusahaan juga perlu memperhatikan perencanaan infrastruktur yang di anggap sepele demi meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 3.3</b></li> </ul>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya pengimplementasian dan pendokumentasian pada setiap proses bisnis untuk dapat memantau setiap sektor bisnis, industri, teknologi, infrastruktur, tren lingkungan hukum dan peraturan. Menerapkan setiap proses bisnis agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mantau untuk arah ke depannya.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 3.4</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan perlu memantau dan mengkaji secara berkala apakah standar ISO 9001:2008 telah secara efektif di disiplinkan di setiap cabang perusahaan?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 3.5</b></li> </ul>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.PLN perlu membentuk dewan untuk memberikan pedoman arsitektur dan saran aplikasi. Anggotanya haruslah orang yang berkompeten pada bidang teknologi informasi.</li> </ul>

		Sehingga keputusan atau penilaian yang ada dapat di pertanggungjawabkan.
<b>2. PO 4</b> • <b>PO 4.1</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pembuatan kerangka kerja yang bersifat pasti. Perencanaan kerangka kerja yang di anggap tidak pasti dalam perencanaannya sebaiknya tidak di cantumkan dalam kerangka kerja. Sehingga tidak membuat bingung para karyawan yang ada.</li> </ul>
• <b>PO 4.2</b>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.PLN perlu membuat suatu komite strategi teknologi informasi di tingkat dewan untuk memastikan bahwa tata kelola teknologi informasi sebagai bagian dari pemerintahan perusahaan. Karena dengan di bentuknya komite tata kelola di harapkan dapat di atur dengan baik ketimbang jika setiap keputusan di ambil oleh satu individu.</li> </ul>
• <b>PO 4.3</b>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya komite pengarah teknologi yang berguna untuk melakukan perencanaan yang pasti akan di bawa kemanakah infrastruktur teknologi yang sedang berkembang di PT.PLN sendiri.</li> </ul>
• <b>PO 4.4</b>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya upaya untuk menjaga keselarasan antara fungsi TI di dalam</li> </ul>

		<p>organisasi, Sehingga keberhasilan Manajemen dari TI untuk mendukung tujuan bisnis dapat lebih di tingkatkan. Penempatan terhadap fungsi TI di dalam organisasi perlu adanya dokumentasi yang jelas tidak hanya melalui media file atau kertas saja perlu adanya dokumentasi melalui media digital.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.5</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan keputusan terhadap strategi dan penempatan dukungan berupa sumber daya manusia sebaiknya tidak menjadi tugas perorangan. Perusahaan perlu membentuk dewan guna melakukan kedua tugas tersebut. Sehingga struktur teknologi informasi dapat lebih efektif lagi mencerminkan kebutuhan bisnis.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.6</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya evaluasi berkala terhadap pekerjaan yang menjadi kewajiban setiap divisi apakah Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Area Dan Rayon telah sukses di laksanakan dalam setiap periode. Hal ini berguna untuk melakukan revisi terhadap Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Area Dan Rayon.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.7</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjamin kualitas TI perlu menjaga keberlangsungan setiap proses optimalisasi</li> </ul>

		dan di laporkan secara detail per proyek yang ada
• <b>PO 4.8</b>	3	• PT.PLN perlu melakukan pemantauan pada lapangan untuk memelihara kedisiplinan karyawan terhadap peraturan yang ada secara spesifik.
• <b>PO 4.9</b>	2	• Perlu adanya penegakan disiplin terhadap SOP yang telah di buat oleh perusahaan. Sehingga resiko-resiko yang ada benar-benar teratasi dengan baik dan SOP tidak hanya sebagai peraturan yang bersifat informal saja.
• <b>PO 4.10</b>	2	• Pengawasan sebaiknya tidak menjadi tanggung jawab perorangan. Sebaiknya pengawasan perlu di lakukan oleh suatu dewan demi pengambilan keputusan yang beragam.
• <b>PO 4.11</b>	3	• Perlu adanya evaluasi berkala terhadap pekerjaan yang menjadi kewajiban setiap divisi apakah Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Area Dan Rayon telah sukses di laksanakan dalam setiap periode. Hal ini berguna untuk melakukan revisi terhadap Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Area Dan Rayon.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.13</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu di cantumkan peraturan yang mengatur mengenai pergantian personel sementara di dalam kebijakan perusahaan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.14</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Indonesia Comnet Plus (ICON+) perlu mengubah prosedur penanganan terhadap error aplikasi dengan cara menempatkan karyawannya ke setiap cabang area sehingga error atau bug pada aplikasi dapat di tangani dengan cepat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 4.15</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan sebaiknya perlu lebih memperhatikan koordinasi dan komunikasi untuk dalam perusahaan, karena dengan membenahan prosedur koordinasi antar tiap divisi dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan.</li> </ul>
<b>3. PO 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.1</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya pendisiplinan terhadap penegakan SOP di setiap kantor cabang untuk menghindari masalah-masalah yang sering terjadi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.2</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP perlu adanya inisiatif dari pusat untuk menegakan kontrol-kontrol, salah satu cara dengan mempertegas sangsi-sangsi yang ada</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.3</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan terhadap SOP harus di lakukan secara berkala setidaknya 2 tahun sekali perlu di tinjau kembali apakah SOP tersebut layak untuk kondisi perusahaan saat ini. Sehingga perubahan tidak perlu menunggu suatu masalah terjadi terlebih dahulu.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.4</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekali lagi penegakan terhadap SOP perlu di tinjau kembali. Jika perlu di adakan sidak atas laporan pelanggaran yang terjadi di setiap cabang perusahaan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 6.5</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perlu adanya pengkomunikasian yang tepat mengenai pemahaman bisnis untuk para pemegang saham. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan pentingnya penimplementasian teknologi informasi pada perusahaan sehingga mereka bagaimana mengetahui kondisi perusahaan sekarang.</li> </ul>
<p><b>4. PO 7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.1</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya evaluasi untuk prosedur perekrutan. Untuk saat ini mungkin perusahaan mengindahkan beberapa masalah masalah kecil dalam proses perekrutan, sehingga sangat di harapkan dengan di lakukanya proses evaluasi prosedur</li> </ul>



		perekrutan ini dapat di hasilkan perbaikan prosedur di masa depan, sehingga masalah-masalah tersebut dapat di hindari
• <b>PO 7.2</b>	2	• Perlu adanya persyaratan yang jelas untuk setiap calon karyawan yang masuk. Sehingga minat kerja dan keahlian dari calon karyawan tersebut dapat tersalurkan secara optimal.
• <b>PO 7.3</b>	2	• Perlu adanya penjabaran yang spesifik pada SOP untuk setiap jabatan yang ada.
• <b>PO 7.4</b>	3	• Perlu adanya evaluasi untuk prosedur perekrutan. Untuk saat ini mungkin perusahaan mengindahkan beberapa masalah masalah kecil dalam proses perekrutan, sehingga sangat di harapkan dengan di lakukanya proses evaluasi prosedur perekrutan ini dapat di hasilkan perbaikan prosedur di masa depan, sehingga masalah-masalah tersebut dapat di hindari
• <b>PO 7.5</b>	3	• Perlu adanya peraturan yang bersifat tertulis mengenai pergantian maupun pemanfaatan anggota cadangan pada kebijakan perusahaan. Sehingga personil dapat memahami dan mematuhi peraturan tersebut.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.6</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya evaluasi untuk prosedur perekrutan. Untuk saat ini mungkin perusahaan mengindahkan beberapa masalah masalah kecil dalam proses perekrutan, sehingga sangat di harapkan dengan di lakukanya proses evaluasi prosedur perekrutan ini dapat di hasilkan perbaikan prosedur di masa depan, sehingga masalah-masalah tersebut dapat di hindari</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.7</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi yang di sertai dengan pelatihan terhadap sumber daya manusia di harapkan dapat di lakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui kemampuan dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Sehingga jika terjadi pengimplementasian teknologi baru sumber daya manusia tersebut telah siap untuk menangani teknologi tersebut.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 7.8</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan informal yang ada perlu di dokumentasikan ke dalam kebijakan perusahaan.</li> </ul>
<p><b>5. PO 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 8.1</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya penjelasan yang lebih jelas lagi mengenai fungsi standar mutu bagi sarana dan prasana teknologi sehingga karyawan dapat mengerti dan menjadikan standar tersebut pedoman.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 8.2</b></li> </ul>	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prosedur dan praktek proses TI yang ada harus di tanggapi dengan serius oleh setiap karyawan sehingg perlunya pengomunikasian kedua hal ini lebih lanjut</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 8.3</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya penerapan yang mersifat konsisten dan merata mengenai standar ISO sendiri untuk semua development akusisi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 8.4</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya penggunaan yang di sertai pengimplementasian menejemen kualitas pada setiap pelanggan, evaluasi secara berkala juga perlu di berlakukan untuk menegakan disiplin terhadap standar tersebut .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 8.5</b></li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya program perencanaan jangka panjang mengenai proses mempertahankan maupun rencana teknologi informasi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PO 8.6</b></li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi yang sesuai dengan menejemen mutu harus du umplementasikan secara merata pada setiap departmen.</li> </ul>